

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

al, D. e. 2011. *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*. Jakarta: Leusercita Pustaka.

Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. 2007. *Kapita Selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu*. Semarang: BP Undip.

Armansyah, K. d. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gratama Publishing.

Djalal, H. 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta.

Dkk, R. D. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi.

Faisal, M. a. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Sofmedia.

Gumilang, A. 2014. *Kriminalistik, pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa.

Hamzah, A. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husein, H. M. 1991. *Buku Penyidikan dan Penuntutan dalam proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lamintang, P. L. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudens*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. 1996. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Marpaung, L. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, F. 1998. *Praktek Penegakan Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, M. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purnama, K. A. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

- Rahardjo, S. Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Riza, M. d. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. SOFMEDIA.
- Rosita, H. S. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siombo, M. R. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 2010. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung
- Tibawono, D. 2000. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Lt Unclos Gt pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut. (Lembaran Negara nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara nomor 4168)
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 2004. Tentang. Perikanan (Lembaran Negara nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4433)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara nomor 154 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara nomor 5073)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen.KP) Nomor:PER.17/MEN/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara nomor 134 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara nomor 4779)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsah (Lembaran Negara nomor 74 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara nomor 5298)